



BUPATI KAPUAS HULU

Kepada

- Yth.
1. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
 2. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu
 3. Camat Se-Kabupaten Kapuas Hulu
 4. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Kapuas Hulu
 5. Koordinator Pendidikan Se-Kabupaten Kapuas Hulu

di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 800/1462/BKS/D2KP-B

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BUKA PUASA BERSAMA PADA BULAN RAMADHAN DAN PELARANGAN OPEN HOUSE/HALAL BI HALAL PADA HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H/TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2794/SJ dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1505 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama Pada Bulan Ramadhan dan Pelarangan *Open House*/Halal bi Halal pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H tahun 2021 maka disampaikan kepada seluruh Pimpinan hal-hal sebagai berikut:

1. Menginstruksikan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerja masing-masing agar melakukan pembatasan kegiatan buka puasa bersama, tidak melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah 5 (lima) orang selama bulan Ramadan 1442 H;
2. Kepada seluruh Pejabat/Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dilarang melakukan kegiatan *open house*/Halal bi Halal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 H tahun 2021;
3. Upaya pencegahan dampak sosial COVID-19, diminta kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu agar:

- a. selalu menggunakan masker ketika berada atau melakukan kegiatan diluar rumah tanpa terkecuali;
 - b. menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*);
 - c. menyampaikan informasi yang positif dan benar kepada masyarakat terkait pencegahan penyebaran COVID-19; dan
 - d. menerapkan perilaku hidup besih dan sehat.
4. Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Kecamatan dan Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian, agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Arsip.